

**POLITIK INOVASI DAERAH: PENDEKATAN TOP DOWN DAN  
KETIDAKBERLANJUTAN PROGRAM  
(Studi Penelitian Wakuncar (Waktu Kunjung Cari Data dan Informasi) di Kelurahan  
Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro Provinsi Lampung)**

**Fairuz Thifal Nabila\*), D. Ghulam Manar\*\*), Laila Kholid A\*\*)  
Email: [thifalfairuz46@gmail.com](mailto:thifalfairuz46@gmail.com)**

**Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Diponegoro, Indonesia**  
Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269  
Telepon (024)7465407 Faksimile (024) 7465405  
Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**Abstrak**

Inovasi merupakan gagasan yang sedang gencar dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Program terkait inovasi dimaksudkan untuk memudahkan pemerintah dalam memberikan pelayanan serta tepat sasaran pada kebijakan tertentu. Program Wakuncar merupakan terobosan inovasi berbasis teknologi informasi yang digagas oleh Ketua TP PKK Kota Metro dan menggandeng Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro untuk bermitra dalam mewujudkan program kepada masyarakat. Program Wakuncar merupakan pendataan yang diinput pada google form oleh Kader Dasawisma, pendataan meliputi identitas kepemilikan rumah, kepala keluarga, lansia, ekonomi keluarga, UP2K (Usaha Peningkatan Pendatapan Keluarga), pola perilaku keluarga, sanitasi rumah tangga, kesehatan keluarga, pengelolaan sampah, dan keanggotaan dasawisma. Pendataan berbasis digital selain untuk mencerdaskan masyarakat akan teknologi informasi, juga untuk memudahkan pemerintah dalam memberikan pelayanan serta tepat sasaran dalam kebijakan-kebijakan yang berlangsung (validitas data masyarakat).

Penelitian bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan inovasi teknologi informasi berupa Program Wakuncar di Kelurahan Rejomulyo Kota Metro dengan melihat aspek politik inovasi dan ketidakberlanjutan program. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian memiliki temuan bahwa permasalahan yang muncul dari program Wakuncar yaitu substansi regulasi, tupoksi OPD, dan keterbatasan anggaran. Tidak ada upaya dan tindak lanjut pemerintah dalam membenahi permasalahan yang terjadi. Komitmen pemerintah dalam melakukan perubahan tidak diimbangi dengan pembenahan permasalahan yang terjadi di lapangan. Ketidaksiapan sistem inovasi secara administratif menjadikan program tidak optimal dalam pelaksanaannya. Kemudian kurang optimalnya insentif berupa keterbatasan anggaran yang diberikan kepada enumerator pada program Wakuncar. Karena sumber anggaran hanya terbatas pada APBD. Pada temuan yang diperoleh pada penelitian dapat disimpulkan bahwasannya program tidak siap secara administratif dan membutuhkan keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti permasalahan yang terjadi pada keberjalanan program Wakuncar.

**Kata Kunci: Inovasi, Ketidakberlanjutan, Regulasi**

## **ABSTRACT**

*Innovation is an idea that is being intensively implemented by regional governments. Innovation-related programs are intended to make it easier for the government to provide services and target certain policies. The Wakuncar Program is a breakthrough innovation based on information technology which was initiated by the Chair of the Metro City TP PKK and collaborated with the Metro City Manpower and Transmigration Service to partner in realizing the program for the community. The Wakuncar program is data collection that is input into a Google form by Dasawisma Cadres, data collection includes the identity of home ownership, head of family, elderly, family economy, UP2K (Efforts to Increase Family Income), family behavior patterns, household sanitation, family health, waste management, and dasawisma membership. Digital-based data collection is not only to educate the public about information technology, but also to make it easier for the government to provide services and be on target in ongoing policies (validity of public data).*

*The research aims to analyze the implementation of information technology innovation in the form of the Wakuncar Program in Rejomulyo District, Metro City by looking at the political aspects of innovation and the program's unsustainability. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews and documentation. The results of the research found that the problems that emerged from the Wakuncar program were the substance of regulations, job description of OPD, and budget limitations. There is no government effort or follow-up to fix the problems that occur. The government's commitment to making changes is not matched by improving the problems that occur in the field. The administrative unpreparedness of the innovation system means that the program is not optimal in its implementation. Then the incentives are less than optimal in the form of limited budgets given to enumerators in the Wakuncar program. Because budget sources are only limited to the APBD. From the findings obtained in the research, it can be concluded that the program is not ready administratively and requires seriousness from the government in following up on problems that occur in the running of the Wakuncar program.*

**Keywords: Innovation, Unsustainability, Regulation**

**\*) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**\*\*\*) Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

## PENDAHULUAN

Pemerintah menjadi pusat dalam pergerakan inovasi teknologi informasi. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Inovasi Daerah menjelaskan mengenai fungsi pemerintah daerah yang dimaksudkan pada inovasi daerah yaitu pemerintah daerah wajib memprioritaskan dalam merumuskan rancangan kegiatan di bidang IPTEK yang disampaikan sebagai kegiatan utama bagi pengembangan IPTEK. Kemudian dijabarkan kembali mengenai fungsi dari pemerintah daerah untuk inovasi daerah adalah membudayakan dan memajukan inovasi yang berkaitan dengan teknologi, memberikan dorongan dan fasilitasi, memberikan motivasi, mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan kemitraan pada unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Inovasi berbasis teknologi informasi yang telah diinisiasi bernama Wakuncar. Wakuncar merupakan kepanjangan dari Waktu Kunjung Cari Data dan Informasi yang menjadi bukti nyata bahwa Kota Metro menerapkan teknologi informasi untuk kemajuan masyarakat. Inovasi tata kelola pemerintahan daerah berupa Wakuncar diatur berdasarkan Surat Keputusan Walikota Metro Nomor 605/KPTS/D-07/2021 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Kegiatan Wakuncar (Waktu Kunjung Cari Data dan Informasi) Kota Metro. Berdasarkan (Diskominfo, 2021), Wakuncar menjadi suatu gagasan dari Ketua TP PKK Kota Metro yang prihatin melihat kecenderungan dimana semakin berkurangnya semangat gotong royong dan sapa tetangga. Kemudian hal ini disambut baik oleh Pemerintah Kota Metro serta menjadikan Wakuncar bermitra dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi khususnya pada bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi.

Awalnya Wakuncar merupakan suatu upaya dalam merespon Covid-19, dimana program Wakuncar dilakukan untuk mendata warga yang bergejala Covid-19 serta

dilaporkan secara berjenjang sampai ke Dinas Kesehatan. Seiring berjalannya waktu, data yang diinput pada google form tidak hanya berbasis data kesehatan melainkan juga Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dan UMKM, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), data kemiskinan, dan potensi kelurahan lainnya. Data yang diinput secara otomatis terhimpun dalam google spreadsheet. Data tersebut kemudian diolah oleh operator, dalam hal ini berkolaborasi dengan Karang Taruna dan selanjutnya Koperator melaporkan hasilnya kepada lurah untuk kemudian sebagai data base yang dapat dimanfaatkan dalam proses pengambilan kebijakan.

Wakuncar merupakan inovasi yang unik dan menarik. Selain itu, bisa menjadi wadah untuk mengkawal apakah keberjalanan inovasi sudah cukup baik atau belum di Kota Metro. Wakuncar sebagai peningkatan kualitas data di Kota Metro melalui format digital dan data spasial dianggap menjadi urgensi dan perlunya diperbaiki pendataan yang telah dilakukan sebelumnya. Menurut Pollit dalam Prasetyo (2018:46), inovasi ditafsirkan sebagai kondisi yang diperlukan untuk modernisasi pemerintah agar dapat menghadapi tantangan sosial baru. Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini berkaitan dengan teknologi informasi yang berdampingan erat dengan masyarakat. Tantangan menjadi tuntutan kepada pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Keterkaitan perencanaan dan penerapan teknologi informasi dengan inovasi memiliki kebermanfaatannya yang dirasakan oleh masyarakat, maka birokrasi harus secara struktur menyusun dan mengimplementasikan penerapan teknologi informasi yang ada. Inovasi pemerintah daerah bertujuan untuk menentukan arah gerak dan pengembangan suatu daerah agar dapat direalisasikan dan berbuah hasil dari kegiatan pemerintah.

Penelitian menarik untuk dilakukan karena program Wakuncar diusung langsung oleh Ketua TP PKK Kota Metro Provinsi Lampung sehingga dapat dianalisis dari segi

politis. Unsur politis pada program dapat diidentifikasi dari model top down. Substansi dari inovasi program yang berbasis digital dan berdampak dengan Kader Dasawisma guna meningkatkan kualitas SDM menjadikan persoalan unik untuk dikaji lebih mendetail. Analisis yang dihasilkan dari penelitian juga dapat mendalami mengenai keadaan program dengan menilik Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Keuangan, infrastruktur, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan program.

## **TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait proses penerapan *e-government* berupa inovasi Wakuncar dalam pemberdayaan masyarakat, mendiskusikan pelaksanaan dan ketidakberlanjutan dari inovasi berupa teknologi informasi (Wakuncar) di Kelurahan Rejomulyo Kota Metro, dan mengidentifikasi peran, pengaruh, atau dampak dari implementasi inovasi Wakuncar khususnya pada pemecahan masalah publik di Kelurahan Rejomulyo. Proses pengambilan data primer dilakukan melalui wawancara dengan narasumber. Teknik pengambilan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## **KERANGKA TEORI**

### **Inovasi**

Inovasi menjadi satu hal yang masih terus diusahakan dan dilakukan oleh pemerintah sehingga teori mengenai inovasi telah banyak merebak dan masih berkembang hingga saat ini. Inovasi pemerintah daerah bertujuan untuk menentukan arah gerak dan pengembangan suatu daerah agar dapat direalisasikan dan berbuah hasil dari kegiatan pemerintah. Rosenfield dalam Sutarno (2012:132) menjelaskan bahwa inovasi merupakan suatu perubahan pengetahuan kepada produk, proses, dan jasa baru, serta tindakan menggunakan sesuatu yang baru. Sedangkan penuturan Mitra dalam Sutarno, inovasi diterjemahkan sebagai pendayagunaan yang berhasil dari suatu ide baru atau sebagai transformasi pengetahuan, keterampilan

teknologi, dan pengalaman untuk membuat produk, proses, dan jasa baru. Pada proses melakukan inovasi dengan elemen baru yang dilakukan oleh pemerintah berfokus pada perbaikan dalam menyalurkan peningkatan pelayanan publik dengan proses pada pengadopsian yang berbeda pada tahap pengembangannya (Alberti & Bertucci, 2007).

### **Politik Inovasi**

Manar dan Alfirdaus (2023) mengungkapkan bahwasannya inovasi merupakan produk politik yang tidak dapat terpisahkan dengan struktur dan kepentingan politik. Diseminasi mengenai respon pemerintah dalam mengambil langkah untuk menjawab persoalan dengan membentuk program inovasi tentunya berkaitan dengan politik. Politik inovasi dimaksudkan sebagai diseminasi inovasi yang diusulkan oleh Ketua TP PKK Kota Metro mengenai teknologi informasi berupa program Wakuncar (Waktu Kunjung Cari Data dan Informasi).

Politik inovasi dapat dikaitkan dengan penjabaran Halvorsen et al. (2005) mengenai top-down innovations. Top-down innovations dimaksudkan dengan pemimpin yang melakukan proses perubahan perilaku, dimana top mengacu pada struktur hirarki yang tertinggi, sedangkan bottom mengacu pada aparatur pemerintah atau pengambil keputusan pada tingkat unit (mid-level policy makers). Penggagas dan relasi kuasa sebagai struktur hierarki tertinggi pada TP PKK Kota Metro menjadikan program bersifat top-down innovations. Karena inovasi berbasis top-down, maka kepemimpinan akan mempengaruhi pelaksanaan inovasi. Karena arah gerak ditentukan oleh pemimpin agar dapat melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan program.

### **Kegagalan Inovasi**

Kegagalan inovasi merupakan sesuatu yang lumrah terjadi. Respon terhadap kegagalan seringkali berupa ketakutan yang dapat menjadi suatu hambatan dalam

menghasilkan ide baru dan mencegah konsep yang berisiko sehingga tidak mengalami kegagalan pada keberjalanan inovasi. Pemerintah daerah seharusnya dapat menerima resiko dalam memandang kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar yang berpeluang untuk mengembangkan ide-ide inovatif sehingga mendorong sumber daya agar lebih berkualitas dan dapat mengatasi permasalahan yang terdapat di masyarakat. Kegagalan selalu menjadi ketakutan yang berakhir pada terbatasnya inovasi yang menjadikan hambatan berkembangnya inovasi itu sendiri (Kuyatt, 2011).

Kegagalan inovasi dilandasi oleh beberapa faktor yang dapat terjadi karena kurangnya komunikasi dalam inovasi serta terjadinya ketidaksesuaian hingga ketidaksiapan pada sistem inovasi (Assyifa dkk., 2023). Faktor-faktor tersebut terdengar klise dan remeh sehingga seringkali tidak dihiraukan. Selain itu, kajian inovasi pemerintahan daerah harus dilihat dari faktor yang mempengaruhi dalam keberjalanan program, baik dari faktor pendukung maupun faktor penghambat mengapa program tidak berjalan secara maksimal.

Kegagalan inovasi ditafsirkan dengan tidak bekerjanya, tidak berfungsinya, atau tidak berhasilnya sebuah upaya baru dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan. Kegagalan inovasi juga dapat disebabkan oleh aspek-aspek yang bersifat teknis. Beberapa hal antara lain ketidakcukupan ketersediaan dana, kurangnya komitmen, kurangnya kejelasan pembagian tugas dan peran serta kurangnya pemahaman terhadap visi inovasi (Porter dan Birdi, 2018).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan dengan cara menstrukturkan data kedalam kategori, memaparkan kedalam komponen, mereduksi data yang penting dan akan diterapkan dalam penelitian serta menarik kesimpulan. Penelitian ini dilakukan di Kota Metro tepatnya pada Kelurahan

Rejomulyo, karena Kelurahan Rejomulyo merupakan pionir dari inovasi Waktu Kunjung Cari Data dan Informasi dan dilaksanakan langsung dibawah TP PKK Kota Metro dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro. Jenis data yang diterapkan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Sumber data sekunder dilakukan dengan menempuh pemahaman berbagai sumber diantaranya literatur, buku, jurnal, serta penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan pada penelitian yang akan dilakukan. Kemudian data-data dianalisis dan diuji kevalidannya melalui triangulasi sumber data sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk dijabarkan sebagai hasil temuan pada penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Inovasi Wakuncar di Kelurahan Rejomulyo Kota Metro**

Waktu Kunjung Cari Data dan Informasi adalah sebuah inovasi PKK untuk mendukung tercapainya Metro Ceria yang pada dasarnya merupakan sebuah metafora dari rangkaian aktivitas masyarakat untuk memperbarui data dan/atau informasi atas kegiatan atau tematik tertentu. Contohnya yaitu melakukan pendataan terkait data harian kasus Covid-19 yang terkonfirmasi, data KWT (Kelompok Wanita Tani) di Kelurahan tertentu, Data UMKM di Kecamatan, informasi objek wisata di setiap Kelurahan, informasi spasial lokasi rumah sakit di Kota Metro, dan kebutuhan pendataan lainnya. Program Wakuncar diperuntukkan sebagai awal menuju e-digital di 22 Kelurahan Kota Metro yang dikelola oleh masyarakat. Tujuan dari Program Wakuncar yaitu untuk memupuk semangat gotong royong dimulai dari keluarga untuk mendukung pembangunan, sebagai penguatan peran dasawisma untuk pencegahan penyebaran/ penularan Covid-19, dan sebagai wadah penguatan kemitraan TP PKK dengan Pemerintah Kota Metro melalui sinergitas antar stakeholder dalam pencegahan penularan Covid-19.

Program Wakuncar merupakan pendataan berbasis digital yaitu melalui google form yang dapat diakses pada link <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVRtiISs95kV6F0Bt6FCXMTJOvxZqd0UyYXC5yRXiMqFtLlg/viewform>. Pendataan dilakukan dengan melakukan pengisian identitas terlebih dahulu. Kemudian akan dilanjutkan dengan pendataan Kepala Keluarga, Lansia, ekonomi keluarga, UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga), pola perilaku keluarga, sanitasi rumah tangga, kesehatan keluarga, pengelolaan sampah, dan keanggotaan dasawisma. Penjelasan Wakuncar secara lengkap dapat diakses pada link <https://linktr.ee/wakuncar>. Apabila mengunjungi link tersebut maka akan diberikan pilihan berupa pendataan Wakuncar, video tutorial cara menghidupkan GPS di HP Android, video tutorial menyalin-tempel koordinat dalam mengisi google form, serta penjelasan materi pemaparan mengenai program Wakuncar. Pilot project dalam program Wakuncar dimaksudkan kepada pengembangan SIM (Sistem Informasi Manajemen) yang mengintegritaskan seluruh data program TP PKK dan pembangunan Kota Metro. Program Wakuncar dilakukan dengan cara yang mudah dimengerti, tidak membebani, dan fasilitas yang sudah ada sehingga program menggunakan google form yang melibatkan kolaborasi dasawisma dan pemerintah.

Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah pada awal keberjalanan program yaitu memperkenalkan program Wakuncar kepada khalayak ramai melalui sosialisasi, pelatihan, dan postingan diberbagai media sosial (Facebook dan instagram TP PKK Kota Metro). Upaya pemerintah dalam memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari pelatihan, sosialisasi, dan *workshop* yang telah dilakukan. Sosialisasi yang telah digagas TP PKK Kota Metro diperkenalkan pada bulan Agustus 2021 di Sekam (Sentra Kerajinan Kota Metro). Pelatihan dilakukan kepada 22 Karang Taruna yang mewakili 22 Kelurahan di Kota Metro. Pelatihan kepada Karang

Taruna dimaksudkan agar mendapatkan pembekalan didalam menerima data dari Dasawisma, menfilter data sesuai dengan kriteria kesehatan, memproses data, menyimpan data di Google Drive, dan mendistribusikannya ke RT, RW, Lurah, Camat, KTN, Puskesmas, Dinas Kesehatan. Sesi *workshop* Wakuncar kedua dilakukan pada tanggal 19 November 2021 Aula Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro dengan kolaborasi antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Tim Penggerak PKK Kota Metro dan pesertanya masih sama dengan *workshop* pertama. Karang Taruna dapat membuat peta spasial RT di lingkungannya masing-masing sehingga Kelurahan akan memiliki peta SIG (Sistem Informasi Geografis ) yang berisi monografi kelurahan, data kependudukan, dan yang terpenting data potensi dan produk unggulan Kelurahan. Penyajian data spasial diwujudkan dalam bentuk situs internet/web GIS yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan dunia luar dengan tujuan dapat memasarkan dan memperkuat *branding* Kota Metro sebagai Kota Berkelanjutan.

Pada tanggal 8 Desember 2021, TP PKK Kota Metro dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan workshop kembali di Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro mengenai Sistem Informasi Geografis (SIG) ke-2 untuk 27 peserta operator wakuncar yang berasal 22 Kelurahan dan 5 Kecamatan di Kota Metro. Kegiatan dilaksanakan dengan memberikan pelatihan cara membuat shape file, digitasi peta, dan melengkapi atribut. Output yang dihasilkan pada kegiatan ini yaitu memperkuat dalam mendalami Sistem Informasi Geografis (SIG). Pada tanggal 30 Desember 2021 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro dan Tim Penggerak PKK Kota Metro menggelar Lokakarya pembelajaran Wakuncar di Aula Kelurahan Rejomulyo. Kegiatan Wakuncar yang difokuskan di Kelurahan Rejomulyo yaitu terkumpulnya data sejumlah 786 responden, peta sebaran lokasi rumah responden lengkap dengan

atribut data, peta batas RT, RW, dan Fasilitas Umum di Kelurahan Rejomulyo. Pada tanggal 19-21 Juli 2022 dilakukan kembali sosialisasi dan *workshop* program Wakuncar bagi Kader dasawisma di Kota Metro. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas Kader Dasawisma dalam pemberdayaan berbasis masyarakat yaitu Wakuncar melalui pengumpulan data dari masyarakat terkait data Kesehatan, UP2K/UMKM, Pengelolaan Lingkungan, Keluarga pra sejahtera dan akan terus berkembang ke data lainnya. Pada 12 Desember 2022, diadakan kembali Workshop Penerapan Sistem Informasi Geografis (GIS) dalam Pengelolaan Data Digital Kelurahan. Peserta dalam kegiatan yaitu operator digital Kelurahan dan Kecamatan se-Kota Metro. Namun berbeda dengan sebelumnya, operator digital yang semula Karang Taruna digantikan oleh Pegawai Negeri Sipil Kelurahan.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Metro Nomor 605/KPTS/D-07/2021 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Kegiatan Wakuncar (Waktu Kunjung Cari Data dan Informasi) Kota Metro memutuskan serta menetapkan pada bagian keempat tertera bahwasannya segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini (keputusan pada SK) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro 2021. Usulan anggaran mengenai program Wakuncar akan disampaikan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang kemudian akan diproses untuk kebutuhan program. Kemudian anggaran yang telah dipergunakan akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat melalui Surat Pertanggungjawaban oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro. Usulan yang dilakukan dipergunakan untuk kebutuhan pelatihan, penyediaan fasilitas berupa laptop serta kuota internet.

### **Politik Inovasi Program Wakuncar (Waktu Kunjung Cari Data dan Informasi) di Kelurahan Rejomulyo Kota Metro**

Politik inovasi pada program Wakuncar dimaksudkan sebagai bentuk diseminasi yang diusung oleh Ketua TP PKK Kota Metro. Program menggandeng pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro khususnya pada bidang pemberdayaan masyarakat dan transmigrasi. Komitmen para penyelenggara dan para pelaku pada program Wakuncar harus dibangun antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, TP PKK, Kelurahan, Kader Dasawisma, dan instansi lain yang terkait. Apabila menganalisis dari SK Walikota Metro Nomor 605/KPTS/D-07/2021 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Kegiatan Wakuncar (Waktu Kunjung Cari Data dan Informasi) Kota Metro yang dijadikan jaminan atas legalitasnya keberadaan tim dan anggaran yang disediakan hanya berisi pembentukan tim dan tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kegiatan Wakuncar.

Tugas pokok dan fungsi dari keberadaan tim tidak dibentuk khusus pada program Wakuncar sehingga hanya menyesuaikan tugas pokok dan fungsi dari instansi masing-masing. Seperti halnya fungsi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro berdasarkan Peraturan Walikota Metro Nomor 37 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Walikota Metro Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro adalah menyusun rancangan teknis kebijakan; melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum; pendampingan dan penyelenggaraan tugas; pelaksanaan, pembinaan, pendampingan, pengawasan, serta pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsi bidang.

Apabila memahami mengenai susunan, tugas, dan fungsi terkait Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara umum melakukan penyusunan rancangan kebijakan, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan, serta menyelenggarakan pendampingan, pengawasan, dan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan instansi yang membawahi program Wakuncar sehingga tugas dan fungsi harus diselaraskan dengan program Wakuncar. Berdasarkan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi (2022: 17), isu strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu:

- 1) Rendahnya pemahaman tentang tugas dan fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM, karang taruna, PKK, Dasawisma)
- 2) Rendahnya kontribusi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
- 3) Rendahnya kontribusi masyarakat dalam aspek sosial budaya dan sumber daya alam melalui pendayagunaan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan.
- 4) Kuota peserta transmigrasi yang sangat terbatas
- 5) Terbatasnya alokasi dana untuk pengiriman transmigran.

Melalui isu strategis rencana kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro tahun 2022, bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi mengambil langkah untuk menelaah usulan program dan kegiatan masyarakat yang juga akan didiskusikan pada mekanisme pelaksanaan musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) yang dimulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota. Kegiatan ini merupakan agenda pemerintah melalui Bappeda Kota Metro sebagai *leading sector-nya*. Tujuan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro sendiri dalam membuat Rencana Kerja yaitu guna

mewujudkan masyarakat yang aktif dalam pembangunan, mandiri dan berdaya saing.

Berdasarkan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro Tahun 2022, Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan memberikan output terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan melalui pembinaan kepada pengurus LKK; terlaksananya pelatihan bagi kelompok kreatif warga; dan terlaksananya kegiatan Pembinaan bagi kader dasawisma Wakuncar (Waktu Kunjung Cari Data dan Informasi). Ketiga sub kegiatan yang telah disebutkan menjelaskan bahwasannya menjawab isu strategis yang telah dijabarkan. Pada sub kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan menyatakan terlaksananya kegiatan pembinaan bagi kader dasawisma Wakuncar. Namun melalui analisis pada sub bab sebelumnya dijelaskan bahwasannya program tidak berjalan secara optimal dikarenakan substansi regulasi yang dijadikan pedoman tidak menjabarkan perintah yang memuat uraian ringkas mengenai pelaksanaan dan pengawasan Program, SDM dimana arah kerja dari OPD sendiri tidak terstruktur dan sistematis sehingga terjadi kurang tegasnya pengawasan saat program berlangsung, dan kurang optimalnya anggaran yang dialokasikan kepada program.

Kemudian apabila meninjau dari isu strategis pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi lebih fokus pada permasalahan transmigran sehingga disposisi untuk kebutuhan program Wakuncar berupa pemberdayaan masyarakat seharusnya difokuskan pada TP PKK Kota Metro, bukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ketidaksihinggaan OPD dalam membawahi inovasi program dianggap membebani kinerja pada birokrat dan aparat pemerintah (Manar dan Laila, 2023). Konkretisasinya di lapangan akan memerlukan tenaga dan waktu ekstra, karena para implementer dipaksa menerapkan sistem baru untuk inovasi program.



### **Ketidakberlanjutan Program Wakuncar Di Kelurahan Rejomulyo Kota Metro**

Program Wakuncar (Waktu Kunjung Cari Data dan Informasi) merupakan sebuah gagasan inovasi berbasis teknologi informasi dari TP PKK Kota Metro. TP PKK Kota Metro menggandeng Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk bermitra dalam mewujudkan inovasi tersebut. Kemitraan yang terjalin menghasilkan output berupa regulasi, sosialisasi atau pelatihan, dan kemitraan dengan instansi yang terkait. Berjalannya suatu program harus dimatangkan terlebih dahulu secara administratif. Pada hal ini, program Wakuncar harus memiliki landasan hukum yang akan membantu dalam pelaksanaan program. Apabila menganalisis terkait regulasi yang dijadikan dasar hukum program Wakuncar yaitu Surat Keputusan Walikota Metro Nomor 605/KPTS/D-07/2021 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Kegiatan Wakuncar (Waktu Kunjung Cari Data dan Informasi) Kota Metro, maka dapat ditemukan substansi dari regulasi hanya menetapkan pembentukan tim fasilitasi kegiatan Wakuncar Kota Metro dan sumber anggaran dibebankan pada APBD Tahun 2021.

Komitmen pemerintah Kota Metro dalam mencapai regulasi yang memadai untuk menjadikan SK Wakuncar sebagai landasan hukum harus ditinjau dari substansinya. Regulasi tersebut tidak memiliki substansi mengenai batasan pemahaman definisi program Wakuncar, Standar Operasional Prosedur, serta tugas pokok dan fungsi OPD. Tim yang dimaksudkan pada regulasi memiliki tugas dalam merancang dan menyelenggarakan tahapan program kegiatan Wakuncar sesuai dengan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja masing-masing. Kemudian tim diminta untuk berkoordinasi dalam pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan program Wakuncar. Gambaran yang diberikan pada regulasi mengenai tugas pokok dan fungsi OPD yang menaungi program Wakuncar terlalu umum, sehingga pembagian tugas dalam melaksanakan tupoksinya bersifat

rancu. Akibat dari tupoksi yang rancu menjadikan pengawasan pada program Wakuncar tidak berjalan secara maksimal.

Apabila menilik dari substansi regulasi juga tidak lagi selaras dengan perkembangan keberjalanan program hingga saat ini. Dapat ditinjau dari sumber anggaran yang dibebankan pada APBD Tahun 2021 sedangkan program masih berjalan hingga Tahun 2023. Jika mengamati upaya pemerintah dalam melakukan tindak lanjut terkait regulasi sejauh ini tidak ada kebijakan berupa pembenahan regulasi khusus atau lanjutan yang mengatur mengenai batasan pemahaman definisi program, tugas pokok dan fungsi OPD secara khusus (ditunjuk pada tugas tertentu), dan pembaharuan mengenai sumber anggaran. Tidak ada tim yang mengatur mengenai pembenahan substansi Surat Keputusan Walikota Metro Nomor 605/KPTS/D-07/2021 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Kegiatan Wakuncar (Waktu Kunjung Cari Data dan Informasi) Kota Metro. Apabila pemerintah telah berkomitmen pada inovasi yang berbasis teknologi informasi, sudah sepatutnya memiliki komitmen pada regulasi, infrastruktur, sumber daya manusia, sosialisasi di lingkungan pemerintah dan masyarakat agar tercipta persepsi yang sama dalam mencapai tujuan program.

Selain daripada regulasi, program juga membutuhkan Sumber Daya Manusia yang mumpuni dibidang teknologi karena program yang digencarkan berbasis teknologi informasi. SDM yang memiliki pemahaman mengenai teknologi informasi dan diamanatkan untuk melakukan pelatihan dan pencerdasan kepada enumerator yaitu Fizul Surya Pribadi dan Yulian Gressando dari Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah. Enumerator yang melaksanakan program Wakuncar yaitu Kader Dasawisma dan Karang Taruna. Tanggung jawab mengenai program Wakuncar yang dibebankan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dialihkan pada Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah yang mengakibatkan

pemahaman dan permasalahan yang ditemui tidak sampai langsung pada pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang secara administratif membawahi program.

Pada keberjalanan program, ditemukan permasalahan dimana terdapat RT yang tidak melakukan program tersebut sehingga perlunya pengawasan dan solusi dari pemerintah terkait hal tersebut. Namun dilapangan tidak ditemukannya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian diadakan kembali sosialisasi kepada enumerator untuk menyamakan persepsi dan tujuan dari program Wakuncar. Pencerdasan yang dilakukan kepada enumerator terus digencarkan agar terjadinya proses perubahan dari masyarakat yang tidak melek akan teknologi menuju masyarakat yang paham akan teknologi informasi. Pada hal ini dapat mewujudkan persamaan persepsi Kader Dasawisma yang menganggap pentingnya teknologi informasi. Namun hal ini bukanlah hal yang mudah sehingga persamaan persepsi belum merata di masyarakat. Tindak lanjut pemerintah dalam menyikapi permasalahan pada SDM diantaranya melakukan sosialisasi kembali mengenai program Wakuncar melalui modul-modul yang telah disiapkan oleh Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah. Kemudian pemerintah juga mengalih tugaskan operator dari Karang Taruna menjadi Staf PNS Kelurahan sebagai bentuk efisiensi anggaran. Namun sikap pemerintah seharusnya tetap menyediakan anggaran khusus kepada enumerator yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk program Wakuncar.

Komitmen pemerintah dalam menjalankan program yang berbasis teknologi informasi harus diimbangi oleh anggaran yang disediakan. Program Wakuncar membutuhkan gadget, kuota internet, dan laptop. Gadget dan kuota internet diperlukan Kader Dasawisma untuk melakukan pendataan program. Sedangkan laptop dipergunakan untuk mengolah data melalui Sistem Informasi Geofrafis yang menghasilkan digitalisasi data Kelurahan. Enumerator juga membutuhkan biaya transportasi dan makan. Namun sumber

anggaran yang tersedia hanya dari APBD sedangkan kebutuhan anggaran yang diperlukan di lapangan cukup besar. Tidak adanya kebijakan atau rencana terkait solusi keterbatasan insentif anggaran pada program Wakuncar.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwasannya permasalahan yang muncul dari program Wakuncar yaitu substansi regulasi, tupoksi OPD, dan keterbatasan anggaran. Tidak ada upaya dan tindak lanjut pemerintah dalam membenahi permasalahan yang terjadi. Komitmen pemerintah dalam melakukan perubahan tidak diimbangi dengan pembenahan permasalahan yang terjadi dilapangan. Ketidaksiapan sistem inovasi secara administratif menjadikan program tidak optimal dalam pelaksanaannya.

## **SARAN**

Pada studi penelitian ini hanya terbatas pada pembahasan mengenai regulasi, SDM, dan anggaran. Keterbatasan penelitian pada regulasi dilakukan melalui substansi regulasi yang tertera dengan mengungkap permasalahan substansinya. Penelitian mendalam dapat dilakukan kembali dengan menganalisis perencanaan OPD dalam membuat inovasi program dan perumusan anggaran yang dapat berkontribusi dan mengimbangi keberjalanan program.

Melalui penelitian yang telah dilakukan, saran yang direkomendasikan oleh peneliti yaitu pemerintah harus dapat memprioritaskan permasalahan yang terjadi sehingga dapat menentukan sikap untuk perkembangan inovasi. Kemudian perlu diadakannya rapat khusus antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, TP PKK, dan Kelurahan Rejomulyo Kota Metro mengenai rumusan perbaikan regulasi program Wakuncar. Pada pertemuan tersebut bahasan atau diskusi yaitu mengenai tugas pokok dan fungsi OPD yang berkontribusi dalam program Wakuncar sehingga tercipta batasan

tupoksi untuk masing-masing OPD. Tindak lanjut OPD setiap tahunnya pada program Wakuncar harus lebih serius dalam menyikapi berbagai permasalahan yang terjadi selama keberjalanan kegiatan. Pemerintah harus terbuka terhadap permasalahan yang terjadi dilapangan sehingga menemukan solusi yang tepat untuk menyikapinya.

Prasetyo, A., Sakti, A. B., Gartika, D., & Arifin, M. Z. (2018). Bunga Rampai Inovasi Berkelanjutan: Kepemimpinan, Kebijakan, Sistem, Ekonomi, Lingkungan dan Pemerintahan. Indocomp.

Sutarno. (2012). Serba Serbi Manajemen Bisnis. Yogyakarta: Graha Ilmu.

## DAFTAR PUSTAKA

Alberti, A., & Bertucci, G. (2007). *Innovation in Governance and Public Administration: Key Issues and Perspectives*. Dalam *Department of Economic and Social Affairs, Innovations in Governance in the Middle East, North Africa, and Western Balkans: Making Governments Work Better in the Mediterranean Region* (hal. 3-12). New York: United Nations.

Assyifa, A. D., & Alfirdaus, L. K. (2023). Inovasi Ladis Song Malam Pemerintah Kota Tegal dan Tantangan Sosial Kemasyarakatan: Analisis Pro dan Kontra Kebijakan. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(2), 87-101.

Diskominfo. (2021). Pemerintah Kota Metro bersama TP-PKK melakukan Lokakarya Wakuncar (Waktu Kunjung Cari Data dan Informasi) Tahun 2021. <https://info.metrokota.go.id/pemerintah-kota-bersama-tp-pkk-kota-metro-lakukan-lokakarya-wakuncar/>.

Halvorsen, T., Hauknes, J., Miles, I., & Røste, R. (2005). *On the differences between public and private innovation*.

Kuyatt, A. (2011). *Managing for Innovation: Reducing the Fear of Failure*. *Journal of Strategic Leadership* Volume 3 No. 2, 31-40.

Manar, D. G., & Alfirdaus, L. K. (2023). Analisis Kegagalan Inovasi Pemerintah Daerah. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 14(1), 18-30.

Porter, J. J., & Birdi, K. (2018). *22 reasons why collaborations fail: Lessons from water innovation research*. *Environmental science & policy*, 89, 100-108.